



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADESA), DANA DESA (DD)  
DAN BAGI HASIL (PAJAK DAN RETRIBUSI) (BHPR) TERHADAP  
BELANJA DESA BIDANG PENDIDIKAN**

**(Studi Empiris Pada Desa se Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

Oleh

**Fitri Yuni Ariska**

**NPM. 21701082080**



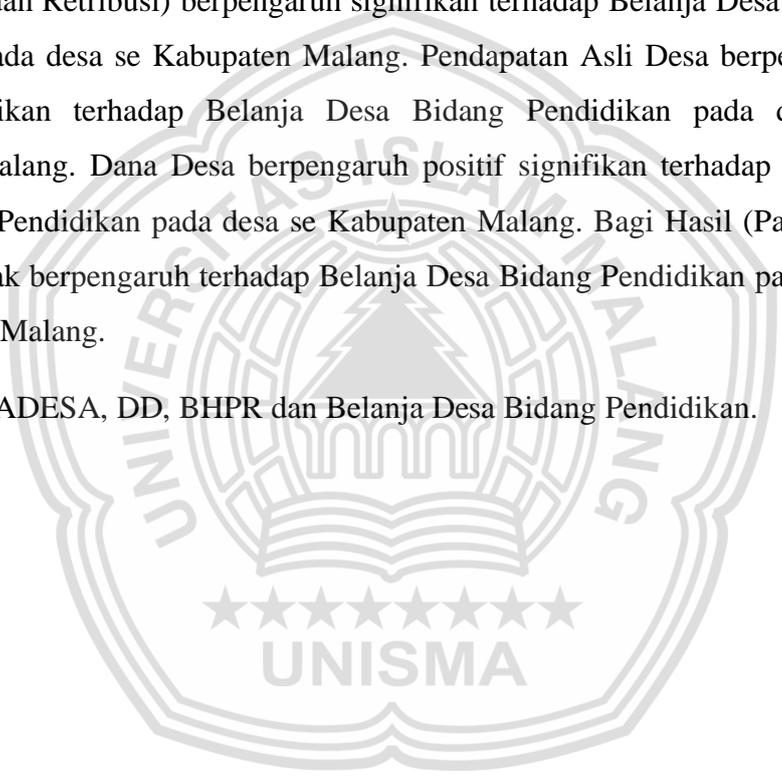
**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
MALANG**

**2021**

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil (Pajak dan Retribusi) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan Pada Desa se Kabupaten Malang. Sampel yang dipilih dengan menggunakan purposive sampling dan diperoleh sebanyak 79 sampel berdasarkan kriteria yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil (Pajak dan Retribusi) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan pada desa se Kabupaten Malang. Pendapatan Asli Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan pada desa se Kabupaten Malang. Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan pada desa se Kabupaten Malang. Bagi Hasil (Pajak dan Retribusi) tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan pada desa se Kabupaten Malang.

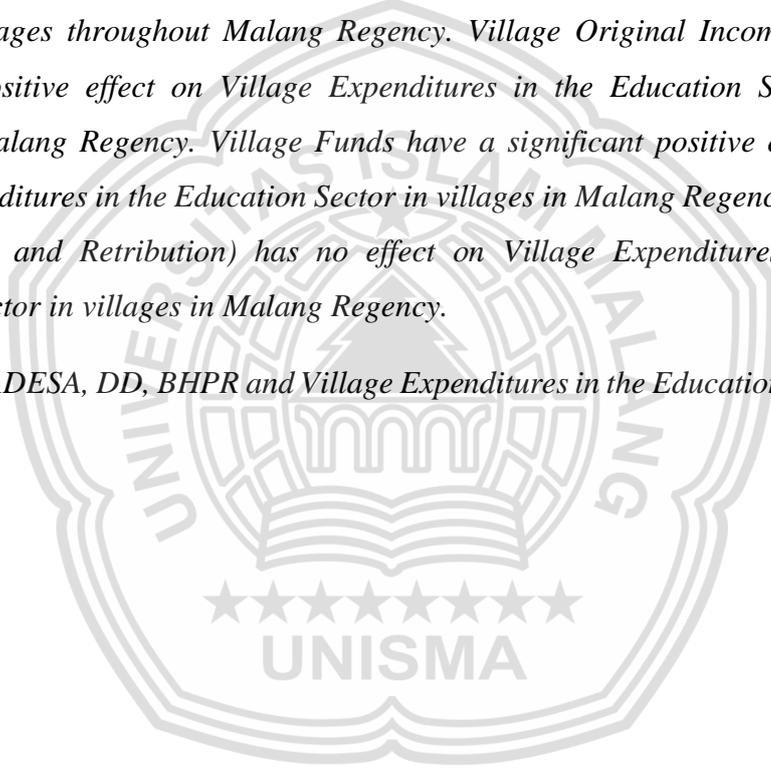
Kata kunci: PADESA, DD, BHPR dan Belanja Desa Bidang Pendidikan.



### **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the effect of Village Original Income, Village Funds and Profit Sharing (Taxes and Retribution) on Village Expenditures in the Education Sector in Villages in Malang Regency. Samples were selected using purposive sampling and obtained as many as 79 samples based on the applied criteria. This study uses multiple linear regression models. The results showed that Village Original Income, Village Funds and Profit Sharing (Taxes and Retributions) had a significant effect on Village Expenditures in the Education Sector in villages throughout Malang Regency. Village Original Income has a significant positive effect on Village Expenditures in the Education Sector in villages in Malang Regency. Village Funds have a significant positive effect on Village Expenditures in the Education Sector in villages in Malang Regency. Profit Sharing (Tax and Retribution) has no effect on Village Expenditures in the Education Sector in villages in Malang Regency.*

*Keywords: PADESA, DD, BHPR and Village Expenditures in the Education Sector.*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ialah sebuah negara yang terdiri dari wilayah tingkat provinsi, wilayah tingkat kabupaten/kota, wilayah tingkat kecamatan dan wilayah tingkat kelurahan yang terdiri dari berbagai desa. Desa adalah bagian dari struktur pemerintahan Indonesia yang terkecil, dalam hal ini desa mempunyai kekuasaan dalam perencanaan pembangunan untuk kemajuan wilayahnya dan meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat (Syamsi, 2014).

Menurut Undang - Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014 menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari situlah keberadaan desa harus diberikan jaminan kelangsungan hidupnya dan diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai bagian dari daerah otonom Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa mempunyai sumber pendapatan dimana pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kabupaten/Kota, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta hibah dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat.

Dalam hal ini alokasi anggaran berasal dari belanja pusat mengefektifkan program berbasis desa yang adil dan merata. Menurut Undang-Undang Desa Bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota dialokasikan paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah, untuk dana Desa (DD) dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, hal ini ialah merupakan bentuk pengayoman dari pemerintah pusat dan daerah kepada pemerintah desa untuk meningkatkan prasarana sosial dalam pemerintah desa, pelayanan mendasar kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain dana yang diperoleh dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sumber pendapatan desa juga berasal dari Pendapatan Asli Desa. Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 PADesa ialah hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat dan lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, misalkan bersumber dari dana bagi hasil PBB yang didapatkan melalui transfer kepada desa sebagai salah satu penyumbang sumber dana pendapatan desa.

Desa memiliki banyak keterbatasan pembiayaan dalam menjalankan pemerintahannya, oleh karena itu berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 2014 menyatakan bahwa desa akan mendapat Dana Desa sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana tersebutkan tersalurkan ke desa secara langsung tanpa melewati perantara. Pada keadaan sesungguhnya Dana Desa disalurkan sebagai bentuk pengawasan terhadap desa dimana jumlah nominal yg tersalurkan berbeda untuk setiap desanya. Alokasi sebesar 10% dari APBN ini yang nantinya akan menambah penerimaan desa.

Dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) dialokasikan sebesar 60% secara merata dan 40% secara proporsional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing daerah. Pemerintah juga mengalokasikan BHPR kepada Desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.

Alokasi anggaran pada bidang Pendidikan oleh APBDesa merupakan wujud nyata dari peran aktif dalam menunjang pelayanan dasar kepada masyarakat desa untuk meningkatkan program Pendidikan di wilayah Kabupaten/kota. Menurut Permendes No. 21 Tahun 2015 yang telah disahkan pada akhir 2015 tentang prioritas Dana Desa tahun 2016. Secara umum prioritas penggunaan Dana Desa ditujukan pada bidang yang dianggap penting, terdiri dari dua yaitu pada aspek pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, salah satunya menyebutkan pada bidang Pendidikan sebagai upaya

peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat desa. Sehingga desa mempunyai peran yang penting dalam mendukung Pendidikan masyarakatnya.

Mahiruni (2019) menyatakan bahwa di tahun 2020 anggaran besar akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dalam hal ini Pendidikan akan diberikan Bosda (Bantuan Operasional Daerah) dengan anggaran yang menakjubkan yaitu Rp. 34 Miliar, anggaran ini merupakan program lanjutan dari Pemerintah Kabupaten Malang yang tertuang dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2019, anggaran Bosda ini diperuntukkan para siswa dan program makanan tambahan serta insentif guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). Dengan dikeluarkan dana yang sebesar ini tentunya Pemerintah Kabupaten Malang mempunyai tujuan yang besar kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam pengelolaan anggaran Pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di Bumi Arema pada tahun 2020. Di tahun-tahun sebelumnya Pemerintah Kabupaten Malang telah berupaya dalam peningkatan kualitas Pendidikan melalui APBD, untuk itu dengan dana yang dikeluarkan pemerintah begitu banyak, diharapkan di tahun 2020 tingkat Pendidikan di Kabupaten Malang dapat meningkat di ranking 10 besar sebab pada tahun sebelumnya tingkat Pendidikan di Kabupaten Malang sempat mengalami keterpurukan dikarenakan yang dipicu oleh faktor anggaran saat itu posisi ranking menduduki pada angka 33 dan akhirnya dengan hasil kerja keras Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang kini tingkat Pendidikan berhasil naik menjadi 20 besar dan sekarang saatnya Pemerintah Kabupaten Malang bangkit kembali diharapkan

bisa meraih tingkat ranking 10 besar di Jawa Timur. Oleh karena itu, kini Bupati Malang menaikkan anggaran untuk alokasi Pendidikan dalam upaya peningkatan mutu Pendidikan di Kabupaten Malang. Bahkan Bupati Malang juga memberikan keleluasaan pada guru maupun kepala sekolah untuk pindah tugas yang dekat domisili atau tempat tinggalnya hal ini bertujuan untuk memudahkan pencapaian target tersebut. Dalam hal ini sebagai bentuk dari bagian percepatan dalam meningkatkan mutu Pendidikan di Kabupaten Malang, pemerintah telah menyediakan modal besar untuk pengoptimalan pemakaian *Education Public Service* (EPS) berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan uraian diatas dan dengan pelaksanaan UU Desa pada saat ini, menjadi pertimbangan peneliti untuk lebih mendalami lebih lanjut tentang apa yang sudah dibahas. Dengan demikian judul yang diajukan pada penelitian ini adalah **“Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil (Pajak dan Retribusi) (BHPR) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan (Studi Empiris Pada Desa se Kabupaten Malang)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

### 1.2.1 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana variabel Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Bagi Hasil (Pajak dan Retribusi) (BHPR) berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan pada Desa se Kabupaten Malang?
2. Bagaimana Pendapatan Asli Desa (PADesa) berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan pada Desa se Kabupaten Malang?
3. Bagaimana Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan pada Desa se Kabupaten Malang?
4. Bagaimana Bagi Hasil (Pajak dan Retribusi) (BHPR) berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan pada Desa se Kabupaten Malang?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan adalah untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah variabel Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Bagi Hasil (Pajak dan Retribusi) (BHPR) berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan pada Desa se Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah Pendapatan Asli Desa (PADesa) berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan pada Desa se Kabupaten Malang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan pada Desa se Kabupaten Malang.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah Bagi Hasil (Pajak dan Retribusi) (BHPR) berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan pada Desa se Kabupaten Malang.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut ini :

1. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pemerintah desa sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil (Pajak dan Retribusi) (BHPR) dalam pengalokasian dana untuk Belanja Desa Bidang Pendidikan Desa se Kabupaten Malang.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini sebagai tambahan referensi untuk mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pemahaman masyarakat mengenai perkembangan Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Bagi Hasil (Pajak dan Retribusi) (BHPR) dan Belanja Desa Bidang Pendidikan pada Desa se Kabupaten Malang.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan mengetahui Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi Hasil (Pajak dan Retribusi) berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan pada Desa se Kabupaten Malang. Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel Pendapatan Asli Desa (X1), Dana Desa (X2) dan Bagi Hasil (Pajak dan Retribusi) (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Desa Bidang Pendidikan (Y).
2. Variabel Pendapatan Asli Desa (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Belanja Desa Bidang Pendidikan (Y).
3. Variabel Dana Desa (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Belanja Desa Bidang Pendidikan (Y).
4. Variabel Bagi Hasil (Pajak dan Retribusi) (X3) tidak berpengaruh terhadap variabel Belanja Desa Bidang Pendidikan (Y).

#### 5.2 Keterbatasan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan maka peneliti menemukan keterbatasan berikut:

1. Variabel dalam penelitian ini Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil (Pajak dan Retribusi).
2. Penelitian ini dilakukan di satu periode penelitian (tahun 2020) sehingga tidak ada perbandingan dengan tahun lainnya.

3. Penelitian hanya mengambil sampel dari satu tempat penelitian yaitu Kabupaten Malang.
4. Kurangnya himbauan kepada pemerintah desa untuk meningkatkan alokasi dana Belanja Desa Bidang Pendidikan, sehingga masih banyak ditemukan desa yang tidak mengalokasikan dananya untuk Bidang Pendidikan.

### 5.3 Saran

Berdasarkan dari keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan hasil penelitian yang lebih maksimal diharapkan peneliti selanjutnya menambahkan variabel independen lainnya, seperti variabel dana otonomi khusus, dana alokasi khusus dan kinerja keuangan
2. Peneliti berikutnya diharapkan untuk menggunakan periode penelitian lebih dari satu tahun sehingga dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian ini.
3. Peneliti berikutnya diharapkan untuk memperluas tempat penelitian tidak hanya mengambil sampel dari Kabupaten Malang saja namun bisa dilakukan pada tempat lain.
4. Untuk Pemerintah Kabupaten Malang diharapkan dapat memberikan himbauan kepada desa untuk mengalokasikan dananya pada Belanja Desa Bidang Pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPKP. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan &Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. *Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa*, 71.
- Dewi, N. A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Desa (ADD),Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). *Electronic Theses and Dissertations UMS*.
- Ghozali, I. (2006;91). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariansin dengan Program IBM SPSS 21 Memperbaharui PLS Regresi Cetakan VII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Habibah, U. (2017). Analisis Pengaruh PADesa, DD, ADD, dan BHPR Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan . *Electronic Theses and Dissertations UMS*, 8-10.
- Janah, A. M. (2018). Analisis Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) Terhadap Belanja Desa Tahun 2017. *Electronic Theses and Dissertations*.
- Luvitasari, M. (2017). Pengaruh PADesa, DD, ADD, BHPR dan Jumlah Murid Paud Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan . *Electrocinc Theses and Disertations UMS*, 8-11.
- Mahiruni, S. K. (2019, Desember 16). *Malang Times*. Retrieved from Dinas Pendidikan Digelontor Anggaran Tinggi, Ini yang Diminta Bupati Malang: <https://www.malangtimes.com/baca/47198/20191216/172700/dinas-pendidikan-digelontor-anggaran-tinggi-ini-yang-diminta-bupati-malang>
- Maskhuri, A. d. (2011). *Metodologi Riset Pemasaran* . Malang: UIN Maliki Press.
- Mulyani, H. S. (2020). Analisis Fly Paper Effect dalam Belanja Desa Berdasarkan PADesa dan ADD. *J-AKSI*, Vol 1 No.1.
- nGalammediaLABS. (2014, Juni 15). *100% Ngalam 73*. Retrieved from Daftar Desa dan Kelurahan di Kabupaten Malang: <http://ngalam.id/read/1321/daftar-desa-dan-kelurahan-di-kabupaten-malang>
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa PERBUP Kuningan Bab III Tentang Penyaluran Dan Alokasi Dana Bagi Hasil

- Permendagri No. 13 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelompokan Pendapatan Desa
- Permendagri No. 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendes No. 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2016
- PMK No. 49/PMK.07.2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- Priyono. (2012). *Mandiri Belajar Analisis Data Dengan SPSS*. Jakarta: Mediakom.
- Sirusa.bgs.go.id. (2020, 11 21). *Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/>
- Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsi, S. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 3 No.1 Hal 21.
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 ayat (4)
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah